**Bandar Maulana**
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 28, No. 2, Oktober 2023
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

# PERKEBUNAN INDIGO DI KARESIDENAN BAGELEN PADA PERIODE SISTEM BUDIDAYA (*CULTUURSTELSEL)* 1830-1870

**Novena Dianing Mahati Wening Dipradja, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno**

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
novenadianing@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini menjelaskan hubungan ketenagakerjaan di perkebunan milik pengusaha Eropa dalam konteks isu kapitalisme kolonial dengan budaya kerja warga lokal. Tulisan ini berupaya untuk menggali dari sudut pandang baru terkait sistem budidaya serta hal-hal yang ditimbulkan olehnya lewat pendekatan komparatif milik the French comparative agriculture school. Konsep yang ditemukan akibat masyarakat agraris di Karesidenan Bagelen yang terdisrupsi karena dikenalkannya ekonomi kapital oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah: 1) penyesuaian jenis pekerjaan (labour) yang awalnya hanya untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari berubah menjadi kegiatan ekonomi ekstraktif, 2) perubahan konsep waktu kerja, penerapan kebijakan ala Barat, konsentrasi usaha para subyek petani yang membingungkan sehingga memicu terjadinya benturan sosial, politik, antara pemimpin birokrat dan masyarakat awam; 3) benturan sosial, politik, akibat masuk kebijakan ekonomi liberal di Karesidenan Bagelen, di mana masyarakat awam kembali bebas mengolah lahan untuk keberlangsungan hidup mereka. Pada kesempatan inimasyarakat mempertukarkan hasil tersebut dengan sejumlah nominal uang untuk membeli kebutuhan pokok.*

***Kata Kunci:*** *Sistem budidaya, the French comparative agriculture school, perkebunan indigo, Karesidenan Bagelen.*

## ABSTRACK

*This research explained the relationship of employment in plantations owned by European entrepreneurs in the context of the issue of colonial capitalism with the work culture of native. This paper seeks a new perspective from the system and its entailed implications through the comparative approach lent from the French comparative agriculture school. This paper finds that: 1) the forced cash-cropping policy imposed by the colonial government in Karesidenan Bagelen required each household to perform labour service so intensively on the export crop that they were forced to abandon other activities that were essential to their survival, 2) wage labour, which had been a sizeable source of supplementary income for many village households, was marginalized as household labour was commandeered for compulsory cash-crop production, 3) these social, political, clashes led to the next period of Liberal Policy where the Indonesian was opened up to private capital and allowed Karesidenan Bagelen to join democratized market economy.*

***Keywords:*** *Cultivation system, the French comparative agriculture school, indigo plantation, Karesidenan Bagelen.*

## PENDAHULUAN

Kajian ini membahas tentang hubungan ketenagakerjaan di perkebunan milik pengusaha Eropa, dalam konteks isu kapitalisme kolonial dengan budaya kerja warga lokal. Permasalahan mengenai sistem pengolahan lahan di pulau Jawa pada periode *Cultuutstelsel* 1830-1870 masih menimbulkan banyak pertanyaan, sehingga terjadi miskonsepsi dan misinterpretasi yang tidak dapat dielakkan. Metode kultivasi yang dipraktikkan dalam sistem budidaya telah disampaikan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch bahwa sesungguhnya ia tidak berharap akan menyeragamkan regulasi bagi seluruh pulau. Pada praktiknya pula, ditemukan bahwa setelah 1836, kecil kemungkinan bagi para Direktur Perkebunan untuk turut campur pada urusan rumah-tangga lokal di tiap-tiap perkebunan. Memo rahasia (dalam periode tahun 1834-1836) dari Gubernur Jenderal J. C Baud yang terbit pada tahun 1840, disampaikan kepada Direktur Kantor Perkebunan, diinstruksikan pelarangan ikut andil pada peraturan pribumi yang sudah ada, sebaliknya mereka diharuskan untuk belajar dari para pemegang kekuasaan pribumi serta dilarang membicarakan tata-cara lokal terkait kebijakan sewa tanah. Hal lain yang ditekankan adalah menghindari aksi-aksi yang nantinya akan berdampak pada kehidupan sosio-ekonomi desa-desa di Jawa.

Pergeseran pola produksi ini diduga berdampak pada munculnya beragam pandangan masyarakat pribumi dan menimbulkan fenomena-fenomena sosial pada saat itu. Adapun permasalahan kerja-kerja agraria atau *agrarian labour* akan dikaji dengan pendekatan milik *the French school of comparative agriculture* guna mengamati fenomena sosial yang terjadi di Karesidenan Bagelen.

## METODE

Penulis menerapkan metode penulisan sejarah pada studi ini, untuk menyajikan dokumen historis terkait posisi dan kondisi pekerjaan agraria di perkebunan indigo di Karesidenan Bagelen pada periode sistem budidaya (1830-1870). Adapun langkah-langkah yang dilalui sebagai berikut: (1) langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan topik dan pengumpulan sumber atau heuristik. Data sezaman yang digunakan berupa arsip-arsip administratif perjanjian politik antara Kerajaan Mataram dan *Nederlandsche Verenigde oost-Indiesche Compagnie* milik ANRI, KITLV Leiden, dan Nationaal Archief Den Hague, dokumentasi dan artikel-artikel dari surat kabar berbahasa Belanda seperti *Java Bode, De Zondag Courant, De Locomotief Samarangsch, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Middelburgsche Courant,* dll terbitan periode 1830-1870, dokumentasi milik *Tropenmuseum National Museum of World Culture*, Amsterdam, dokumentasi milik *the Royal Botanic Gardens at Kew*, London, dan studi-studi terkait sistem budidaya yang nantinya akan disajikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini mengkaji sebagian besar sumber-sumber asing yang mendokumentasikan kejadian-kejadian selama periode 1830-1870. (2) kritik sumber atau verifikasi dengan sumber-sumber sekunder seperti analisis sosiologi dan antropologi dokumen historis terkait fenomena yang diteliti guna mencermati kredibilitas dan reliabilitas sumber primer. Penulis melakukan verifikasi lewat korespondensi dengan narasumber peneliti kolonial Belanda, salah satunya Willem van Schendel dari Universitas Amsterdam; (3) interpretasi dari fakta-fakta sejarah; dan langkah terakhir, (4) historiografi yakni penulisan hasil riset yang disusun secara kronologis dengan menggunakan logika sejarah.

## PEMBAHASAN

### Indigo Dari Masa Ke Masa

Eksistensi pewarna indigo di Indonesia tidak lepas dari peranan masyarakat adat yang menyertakan pewarna alami indigo pada segala kesempatan baik untuk acara menyangkut kepercayaan, maupun aktivitas sehari-hari. Melihat pengrajin indigo menyaring sari pati tanaman di acara pekan budaya atau sekadar berpapasan dengan orang-orang yang bangga mengenakan pakaian dengan dengan pewarna indigo, memunculkan rasa kekaguman dan rasa penasaran terhadap cerita kejayaan pewarna ini di masa lampau.

### Indigo pada Mulanya

Indigo adalah salah satu dari bahan pewarna tertua di dunia serta satu-satunya bahan pewarna biru organik tahan luntur, yang diproduksi secara massal sejak zaman dahulu kala. Masa dahulu kala dapat merujuk kepada salah satu masa peradaban manusia kuno di Mohenjo Daro yang kini termasuk daerah India, rumah dari segala jenis teknologi tekstil dunia. Meskipun asal muasal pewarna ini tidak diketahui secara pasti, karena indigo juga ditemukan di berbagai peradaban, namun India menjadi signifikan oleh sebab letak geopolitiknya sebagai titik perniagaan rempah-rempah dan tekstil di sepanjang Jalur Sutera, hingga menjadikannya situs penyebaran teknologi pewarna indigo, baik ke timur maupun jauh ke barat.

### Indigo pada Abad Pertengahan dan Periode Kolonial

Di Kawasan Timur Tengah, dalam dunia perdagangan indigo diklasifikasikan sebagai rempah-rempah. Pelabuhan dan pasar utama di wilayah Baghdad, Kabul, Erbil, Aleppo, Aden, Bursa, Konstantinopel, Alexandria, dan Kairo merupakan tempat-tempat ditemukannya indigo dalam kuantitas industri. Agak sulit mencari asal penyuplai indigo Timur Tengah, meskipun beberapa catatan sejarah kuno menyebutkan kemungkinan berasal dari daerah barat laut India. Hal ini dibuktikan dari temuan corak kain katun cap dengan pewarna indigo di Mesir yang diperkirakan berasal dari tahun 1275 SM, yang mana mirip dengan corak batik cap asal Asia Selatan dan Tenggara. Ketika orang Eropa mencapai India, Maluku, Tiongkok, dan Jepang, mereka secara aktif menukar barang bawaannya dengan indigo.

Lalu pada awal abad ketujuh belas, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis berhasil mendirikan titik-titik transaksi. Hal ini pun menyebabkan surplus persediaan barang niaga dari timur ke pasaran barat, sehingga menurunkan harga jual indigo. Perlahan tapi pasti, barang indigo menjadi barang pokok perdagangan. Kedatangan indigo ke Eropa pun tak pelak menggeser *woad* karena hasilnya lebih terkonsentrasi sehingga cocok untuk merias bahan katun. Belanda adalah pemain utama monopoli indigo Jawa di saat bangsa-bangsa lain saling berebut untuk mendapat porsi dari indigo India bagian barat. Pada abad kedelapan belas perdagangan indigo dari timur ke Eropa menyusut sebagai imbas dari perkebunan mereka di Hindia Barat (Amerika Tengah dan Amerika Serikat bagian selatan) yang mengadaptasi metode produksi dari India.

Namun, pada awal abad kesembilan belas supremasi indigo kembali ke timur. Bengal dan Bihal menjadi sentra-industri indigo dunia. Hal ini membawa implikasi tingginya permintaan untuk memenuhi permintaan industri tekstil Eropa sebagai konsekuensi dari Revolusi Industri Pertama termasuk diantaranya menjadi bahan pewarna seragam angkatan bersenjata. Selama berabad-abad, indigo masih memiliki valuasi tinggi, bahkan setelah ditemukannya

pewarna sintetis seperti *alizarin* sekalipun. Kebanyakan indigo kualitas ekspor berasal dari wilayah India yang dikuasai Inggris. Sementara di Indonesia, Belanda mendulang laba indigo Jawa hingga awal abad ke-duapuluh. Interupsi singkat terjadi pada tahun 1811 saat Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris, setelah diserahkan oleh Belanda yang pada waktu itu dikuasai Perancis. Selama masa kekuasaan tersebut, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jawa hingga tahun 1816. Pada periode tersebut ia menulis *History of Java*. Lewat kompilasi tulisan dari hasil observasinya selama lima tahun, Raffles mengatakan jika indigo adalah komoditas niaga bernilai tinggi, sehingga produsen lokal 'dipaksa' untuk memenuhi permintaan ekspor, jauh sebelum berdirinya sistem budidaya. Jawa menyediakan pedagang-pedagang Belanda sumber indigo sepanjang abad kesembilan belas. Bahkan di akhir abad tersebut, Belanda masih mengekspor setidaknya nyaris satu ton dari 150 perkebunan yang tersebar di beberapa titik, sampai kehadiran indigo sintetis menggusur supremasi indigo organik India dan Jawa dari pasar komersil. Hal yang perlu menjadi perhatian ketika indigo jamak diketahui sebagai bentuk eksploitasi pemerintah kolonial terhadap warga pribumi, pewarna ini juga diproduksi produsen lokal untuk ekspor, barter di pasar internasional, dan keperluan lokal.

## Tanaman Indigo dan Rupa-Rupa Kegunaannya

*Indican* adalah senyawa kimia yang dihasilkan dari tanaman-tanaman tersebut sebagai agen pewarna biru, baik dari *woad* Eropa, *Indigofera* India dan Jawa, *Polygonum tinctorium* Ait. (= *Persicaria tinctoria* (Ait.) H. Gross), atau genus lain seperti *Strobilanthes flaccidifolius* Nees (*Baphiacacanthus cusia* (Nees) Bremek, *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze), semua tanaman ini menghasilkan rantai kimia yang sama bahkan ahli kimia sekalipun kesulitan menentukan sumbernya secara presisi. Alasannya kemungkinan akibat penamaan *Indigofera* (secara harafiah sebagai penghasil indigo) oleh Carl Linnaeus (1701-1778) saat penyusunan awal sistem klasifikasi botani. Genus *Indigofera* merupakan bangsa polong-polongan, terdiri atas 800 keluarga tanaman, tapi hanya beberapa yang memiliki kadar *indican* tinggi. Adapun spesies umum dibudidayakan untuk pewarna indigo yakni *I. tinctoria L.* (= *I. sumatrana* Gaertn.), sebuah semak pegunungan yang kerap ditemui di wilayah tropis dan subtropis. Persebaran spesies tanaman ini bersamaan dengan teknologi pewarnaan dari India bergerak ke Asia Tenggara, Timur Tengah, mencapai Afrika, hingga akhirnya dibawa ke Amerika. *Indigofera* bisa tumbuh di banyak tempat. Bahkan di Jawa sekalipun yang terkenal memiliki tanah subur, tanaman ini butuh perhatian khusus supaya menghasilkan pewarna kualitas baik.

## Profil Karesidenan Bagelen

Sebelum kita mengenal satu wilayah di Indonesia yang kini disebut sebagai Provinsi Jawa Tengah, kawasan tengah pulau tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai Karesidenan. Karesidenan merupakan suatu wilayah setingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang residen yang berkewarganegaraan Kerajaan Belanda. Salah satu Karesidenan yang sangat berpengaruh di wilayah selatan Jawa bagian tengah adalah Karesidenan Bagelen. Wilayah ini dianggap bagian tersubur di Pulau Jawa, sehingga Pemerintah Hindia Belanda berupaya memanfaatkan potensi agraris daerah tersebut dengan sebaik-baiknya.

## Karesidenan Bagelen Secara Geografis

Karesidenan Bagelen memiliki luas ± 3.831 km² dan berpenduduk sebanyak 238.764 jiwa menurut sensus tahun 1830. Secara geografis wilayah ini terletak pada posisi $109^0$ 47′28″ – $110^0$ 8′20″ Bujur Timur dan $7^0$ 32′ – $7^0$ 54′ Lintang Selatan, sehingga memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata pada kisaran $19^0$C – $28^0$C, dan kelembaban udara antara 70% – 90% disertai curah hujan tinggi pada bulan Desember.

## Status Administratif Karesidenan Bagelen

Perkembangan administratif wilayah Bagelen tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sebelum ditanda-tanganinya Perjanjian Giyanti oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Nicholas Harting (perwakilan VOC) pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta lalu menjadikan Bagelen sebagai daerah Karesidenan di bawah pemerintahan Hindia Belanda, Bagelen merupakan bagian dari wilayah Negaragung Mataram. Pasca perjanjian tersebut, kerumitan struktur geopolitik pun terjadi di wilayah Bagelen. Hal ini terjadi karena adanya sengketa pembagian distrik, tergantung pada pemegang lunggguh desa yang bersangkutan, apakah lebih memilih menjadi pejabat Surakarta atau Yogyakarta. Sehingga Bagelen pun berubah menjadi wilayah mancanegara dari kedua pusat kekuasaan tersebut.

Pada tanggal 27 September 1830 setelah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830) yang mana dimenangkan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda, para Raja Mataram terpaksa menandatangani kontrak politik peralihan *nagari* yang melepaskan daerah-daerah pesisir dari kekuasaan Mataram, termasuk di dalamnya wilayah Mancanegara Bagelen yang merupakan lumbung padi untuk Kasultanan Mataram. Kontrak politik ini menjadi titik awal dijalankannya sistem administratif baru di daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dikuasai penuh oleh Pemerintah Hindia Belanda, seperti daerah Bagelen. Sistem baru ini membuat daerah Bagelen dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan daerah Karesidenan. Guna mendampingi jalannya proses administratif di wilayah Karesidenan, pemerintah Hinda Belanda menempatkan seorang Residen dan pembantu-pembantunya untuk memegang pemerintahan.

Status Karesidenan bagi daerah Bagelen terus berlaku hingga 1 Agustus 1901 sebelum akhirnya dilebur dengan Karesidenan Kedu. Sejak tanggal 27 September 1830, pemerintah Hindia Belanda memulai periode baru untuk kedua belah pihak yaitu antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kasultanan Mataram yang bernama sistem budidaya atau *Cultuurstelsel*. Sistem ini bekerja sama di bidang bisnis agrikultural, namun Pemerintah Hindia Belanda belum bisa mengeksploitasi isi perjanjian tersebut seoptimal mungkin.

## Dinamika Masyarakat Karesidenan Bagelen

### Struktur Masyarakat Bagelen

Masyarakat Jawa dihadapi kepada berhadapan dengan masalah-masalah khas kaum koloni seperti stratifikasi sosial (lapisan masyarakat semacam kasta), diskriminasi ras, perbedaan status dan kelas. Selain itu masyarakat Jawa juga dihadapkan kepada persoalan-persoalan perubahan dan mobilitas sosial akibat dari reformasi kebijakan, kesadaran peran politik, dan kecanggungan birokrasi modern. Perkembangan birokrasi modern yang ditandai dengan dikenalkannya literasi abjad fonetik dan konsep-konsep ekonomi internasional mengubah tatanan birokrasi tradisional kerajaan, yang pada

akhirnya akan menggeser hierarki sosio-antropologis masyarakat Jawa sebelumnya. Terkait dengan masyarakat Bagelen, maka kita akan membahas hal-hal yang tampak secara umum sebagaimana masyarakat Jawa lainnya dan hal-hal yang bersifat lokal.

Hal umum yang patut menjadi sorotan adalah sistem penyewaan tanah di bawah pengawasan Kerajaan Mataram. Sistem sewa ini memiliki ciri khas *patron-klien* warisan dari raja-raja Mataram terdahulu. Sistem ini melibatkan kaum bangsawan pribumi atau pejabat pemerintahan, pemuka agama, dan pengusaha asing yang menanamkan investasinya di Pulau Jawa. Sementara itu, mayoritas masyarakat Jawa menempati hierarki terbawah dan bekerja sebagai buruh yang tunduk dan banyak bergantung pada patron masing-masing, baik secara politis maupun ekonomis. Maka dalam struktur ekonomi politik dapat diketahui bahwa pemerintah Hinda Belanda berada pada lapisan pertama elit politik. Sementara itu tuan tanah, pemilik modal, mandor perkebunan, para kyai, pemuka spiritual dengan lahan yang luas berada di lapisan kedua setelah pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan para penggarap lahan jelas berada di strata terbawah sosial masyarakat agraris Jawa.

## Sistem Ekonomi Modern dan Pergeseran Sosial-Budaya

Bagelen mengalami empat kali perubahan sistem ekonomi sejak masih berupa wilayah Mancanegara Kasultanan Mataram sampai akhirnya beralih menjadi wilayah residensi. Sistem tersebut ialah sistem upeti, sistem sewa tanah, sistem budidaya dan ekonomi liberal. Sistem upeti berlaku saat Bagelen berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram, sistem sewa tanah berlaku saat pemerintah kolonial Inggris berkuasa, sementara itu sistem budidaya efektif berlaku setelah kekalahan Kerajaan Mataram pada Perang Jawa dan diinisiasi oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van Den Bosch. Ide-ide ekonomi liberal sebenarnya sudah pernah diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Inggris lewat Raffles namun kurang berhasil karena ketika itu masyarakat Bagelen bingung dengan implementasi ide-ide tersebut. Sebelum akhirnya sistem ekonomi liberal di kuatkan lewat undang-undang agraria tahun 1970, Bagelen dalam urusan tata penggunaan lahan hanya memperlakukan sistem upeti kepada Kerajaan Mataram.

Pada masa singkat pemerintah Kolonial Inggris, Raffles mengenalkan sistem sewa tanah yang bertujuan untuk menghapuskan sistem relasi ekonomi VOC yang merugikan warga lokal, lewat sistem ini masyarakat dibebaskan menanam tanaman yang mereka kehendaki untuk dapat diekspor keluar negeri. Pemerintah hanya wajib mengatur serta mengelola stimulus dan pasar bagi para produsen atau petani komoditas ekspor. Sistem ini berjalan hampir di seluruh Pulau Jawa kecuali di Batavia dan Parahiyangan. Sedangkan di Jawa Tengah hampir semuanya mengadopsi sistem tersebut. Meskipun hanya berlansung relatif singkat, yakni selama lima tahun (1811-1816) masa pemerintahan Kolonial Inggris berpengaruh sangat signifikan dan menjadi dasar kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang kembali berkuasa di Hindia Belanda.

Sistem adopsi pemerintah kolonial Inggris yang dikenal sebagai *Landlijk Stelsel* menghilangkan unsur paksaan dan diganti dengan sistem kontrak yang diadakan secara sukarela. Perubahan sistem ekonomi ini mengubah keadaan sosial budaya serta menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional menjadi sebuah ikatan kontrak. Hal inilah yang membuat kehidupan sosial masyarakat Bagelen terdisrupsi. Akan tetapi ternyata

sistem ini kurang berhasil di lapangan karena tidak saja gagal dalam menghasilkan komoditas ekspor secara reguler, tapi juga terhalang gengsi sosial para bupati dan kepala desa dalam ikatan-ikatan tradisional meskipun sudah digantikan oleh pejabat-pejabat Eropa. Mereka tetap memungut pajak secara langsung kepada petani. Peraturan yang dicetuskan oleh Raffles hanya dapat bertahan selam lima tahun di era Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826). Sistem sewa tanah dihapuskan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch tahun 1830 dengan menghidupkan sistem budidaya atau *Cultuurstelsel* dengan tujuan mengisi kas Kerajaan Belanda yang kosong setelah revolusi Belgia.

Efektifitas sistem budidaya berjalan seturut dengan kemenangan pemerintah Hinda Belanda atas Perang Jawa (1825-1830) dan berpindahnya status Bagelen dari wilayah Mancanegara menjadi wilayah Karesidenan. Pemerintah Hindia Belanda membuka banyak perkebunan guna mengintensifikasikan produk hasil komoditas ekspor dengan cara mempekerjakan penduduk pribumi sebagai tenaga upah perkebunan. Tanaman wajib wilayah Bagelen pada saat itu adalah indigo yaitu sejenis tanaman penghasil pewarna kain. Ciri utama dari sistem budidaya adalah diwajibkannya kaum petani untuk membayar pajak berupa barang yaitu hasil-hasil pertanian ataupun perkebunan mereka bukan dalam bentuk uang seperti pada masa sistem sewa tanah milik pemerintah Kolonial Inggris. Selain wajib menyerahkan hasil panen indigo, para petani juga wajib menyetorkan padi dan palawija sebagai pengganti pajak.

## Perkebunan Indigo dan Karesidenan Bagelen

Sekitar awal tahun 1800, serangkaian peristiwa bencana lokal menghasilkan efek riak atau *ripple effect* terhadap pasar indigo internasional. Zat pewarna organik ini merupakan barang incaran di Eropa, sedangkan bahan bakunya tumbuh di daerah beriklim tropis. Ekspansi kolonial memungkinkan tiga kekuatan Eropa saat itu seperti Spanyol, Perancis, dan Inggris, untuk melakukan pembudidayaan tanaman ini di wilayah-wilayah seberang laut 'miliknya'. Spanyol mengimpor sebagian besar indigo dari Guatemala, El Salvador, dan selatan Meksiko, Perancis mengambil dari Haiti, sedangkan Inggris bergantung dari koloni mereka di Amerika bagian utara. Ketiga penyedia indigo dari Benua Amerika ini runtuh di saat bersamaan dengan penyebab berbeda. Perang dan penyakit tanaman menghancurkan pos produksi Guatemala, sementara itu revolusi yang terjadi di Amerika dan Haiti, menghadang ekspor ke Inggris dan Perancis. Krisis-krisis lokal di wilayah koloni ini terjadi saat permintaan indigo sedang meningkat pesat, sehingga pengusaha-pengusaha Eropa memutar otak, mencari lokasi tropis lainnya, yang mampu mengakomodasi permintaan tersebut.

Ketika Inggris mengalihkan pandangan ke wilayah koloni baru mereka di India, Belanda pun mencoba masuk ke pasar indigo dengan memulai eksperimen di Indonesia.

Langkah radikal ini menjadikan Asia sebagai pengganti Amerika di pasaran indigo Eropa, dengan India sebagai produsen utama mengalahkan Indonesia. Hal ini juga berimplikasi pada bergesernya relasi pekerjaan atau *labour relations.* Sistem di Amerika memisahkan relasi lahan dan pekerjaan penggarapnya, di Amerika, pekerjaan menggarap perkebunan orang Eropa dilakukan oleh budak.Awalnya model ini pernah dicoba di Asia, tapi gagal akibat pondasi kolonial di masyarakat. Adapun di Jawa (dalam konteks penulisan ini melingkupi wilayah Jawa Tengah dan Jawa

Timur tanpa Madura, sementara untuk wilayah Jawa Barat disebut sebagai Priangan), model perkebunan ini tidak dapat berjalan karena masyarakatnya sebagian besar merupakan petani.

Namun para pengusaha Eropa tidak kehilangan akal untuk mendapatkan tenaga kerja sebanyak mungkin dengan harga yang murah di wilayah 'milik' mereka. Jawa, meskipun memiliki tanah subur dan iklim tropis, memberikan beragam implikasi terhadap budidaya tanaman indigo. Secara geofisika, iklim di Jawa saat itu mudah diprediksi; jarang terjadi banjir bandang dan hujan besar musiman, sehingga bisa diandalkan untuk aktivitas agrikultur.

Akan tetapi, Jawa tidak memiliki banyak delta sungai yang memudahkan praktik tani tadah hujan. Selain itu, lanskap alam Jawa sebagian besar berupa pegunungan sehingga penggarap lahan harus berjalan cukup jauh dari wilayah tinggal mereka.

Hasil panen indigo pun harus diangkut menggunakan pedati atau gerobak yang ditarik kerbau, melewati jalan-jalan pegunungan yang sangat buruk guna menuju pabrik-pabrik pengolahan. Hal-hal tersebut tentunya merugikan untuk budidaya indigo, apalagi ketika bertemu dengan sistem pengaturan guna lahan di Jawa, sehingga indigo Jawa tidak memiliki sukses komersil setara dengan indigo India.

## Budidaya Indigo di Karesidenan Bagelen

Budidaya indigo sebenarnya sudah berjalan dari awal berdirinya VOC di tahun 1602. Bisnis ini dimulai oleh ambisi Joan van Hoorn yang mengenalkan budidaya tanaman indigo sambil membawa bibit Gujarat dan Coromandel pos-pos indigo Belanda sebelumnya. Hanya saja daerah-daerah pesisir Jawa yang ditunjuk untuk mengembangkan bisnis ini belum mampu memenuhi kebutuhan ekspor Batavia. Indigo bukan merupakan hal baru di Jawa, sebab sudah lama digunakan untuk kebutuhan mewarnai lurik dan batik.

## Sistem Agraria Karesidenan Bagelen

Pemerintah kolonial Belanda sangat yakin akan keuntungan yang bakal mereka raih dengan usaha budidaya serta produksi indigo di Jawa dan berharap menghasilkan keuntungan sama kuat dengan koloni mereka di Amerika. Hanya saja, ternyata rantai komoditas ini terbukti cukup rumit dalam pengaplikasiannya. Pemerintah kolonial tidak dapat menjalankan model bisnis kala itu perkebunan dengan tenaga kerja budak seperti di Amerika dan berpikir untuk mencari model baru yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Keputusan tentunya berujung pada penyesuaian model bisnis kolonial dengan sistem yang berjalan di masyarakat lalu kita kenal sebagai sistem budidaya (*cultuurstelsel*). Penyesuaian model bisnis kolonial ini terjadi setelah melihat prakondisi sistem agraria masyarakat Jawa yang ternyata lebih tangguh ketimbang milik masyarakat *native* Amerika, sistem kemasyarakatan di Jawa termasuk pengelolaan tanah yang diatur oleh para pejabat Kerajaan Mataram tidak bisa digeser begitu saja dari posisi awalnya.

Tidak hanya itu saja, lambat laut pemerintah kolonial akhirnya pun memahami jika iklim musim Asia, tanah, dan suplai air membatasi apa yang ingin diraih oleh mereka. Pemerintah kolonial harus berjibaku dengan kerumitan ragam susunan *eco*-agraria tersebut.

## Senjakala Indigo di Karesidenan Bagelen

Keputusan pemerintah kolonial untuk terjun ke pasar indigo Eropa dengan optimalisasi aset Kerajaan Belanda di Pulau Jawa memperumit kondisi relasi

ketenagakerjaan antara kaum tani dengan pemangku kekuasaan yang sejak awal luwes secara definisi maupun pembagian peranan antar *stakeholders*. Keputusan implementasi sistem budidaya di Jawa menciptakan satu set relasi ketenagakerjaan yang khas di Karesidenan Bagelen. Terlebih relasi ketenagakerjaan yang tercipta karena produksi indigo ini menggerogoti masyarakat selama lebih kurang 5 dekade. Kejayaan indigo di Karesidenan Bagelen tidak berlangsung lama, yakni di akhir tahun 1820-1850an. Memasuki tahun terakhir sistem budidaya di tahun 1860-1870an, indigo perlahan digantikan oleh tanaman lain seperti tebu, teh, dan kopi.

## KESIMPULAN

Studi mengenai sejarah budidaya indigo di Jawa merupakan salah satu studi yang termasuk dalam kajian kultivasi tanah yang lekat dengan budaya masyarakat Indonesia sebagai bangsa agrikultur. Pada penulisan artikel ini, mengupas konsep sistem agraria guna menghubungkan skala-skala analisis dalam studi kehidupan masyarakat rural/pedesaan, serta membantu memahami sejarah perkembangan agrikultur. Salah satunya berupa bentuk perkembangan-perkembangan yang jamak diartikan sebagai krisis atau revolusi agrikultur. Oleh karena itu pendekatan yang dipilih adalah *the French comparative agriculture school*. Pendekatan yang berusaha menjalin berbagai perspektif; mulai dari praktik-praktik agrikultur dalam suatu ekosistem yang dieksploitasi hingga mengkaji relasi sosial secara global yang terbentuk dari praktik-praktik tersebut. Seperti kita ketahui, wilayah Bagelen pada masa sistem budidaya merupakan daerah pusat perkebunan indigo.

Kawasan ini sempat menjadi sentra penghasil indigo terbesar di Jawa sampai akhir masa sistem budidaya. Pada kasus yang dialami Karesidenan Bagelen terindikasi jika para administrator perkebunan dan pengusaha Belanda yang berinvestasi menemukan bahwa tata aturan agraria patron-klien di wilayah tersebut tidak mudah digantikan begitu saja seperti yang diterapkan di koloni Amerika Tengah dan Utara. Benar adanya bahwa pada aspek teknis, transfer ilmu pengelolaan produksi indigo berpindah dengan mudah beserta dengan personil manajerial dari koloni Belanda di Amerika ke Jawa, sehingga pada level sistem pemanenan, tidak terlalu sulit untuk mengenalkan dan menambahkan tanaman indigo untuk dibudidayakan di wilayah Bagelen. Akan tetapi jauh lebih sulit menyesuaikan komoditas indigo di level sistem aktivitas dan sistem agraria pada wilayah ini. Secara sosio-antropologis banyak hal yang tidak berubah secara signifikan di Bagelen saat perkebunan indigo menjadi kewajiban di kawasan tersebut, namun secara sosio-ekonomi banyak hal terjadi seperti meningkatnya jam kerja di perkebunan dan pabrik pengolahan indigo yang membuat kaum tani akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tanggung-jawab di perkebunan begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

ANRI, *Residen Bagelen 28 Juli 1832, Bagelen No.7/3.* Jakarta: ANRI, 1832.

ANRI, *Surat Insinyur Direksi Perkebunan 29 Mei 1834,* Jakarta: ANRI, 1834.

ANRI, *AV 1842, Bagelen 2,* Jakarta: ANRI, 1842.

ANRI, *CV 1856, AC Ikan 1636,* Jakarta: ANRI, Tanpa Tahun Terbit.

### Artikel

Balfour-Paul, Jenny. 1997. *Indigo in the Arab World.* 42-67.

Cochet, Hubert. 2012. "The Systeme Agraire Concept in Francophone Peasant Studies". *Geoforum, 43*, 128-136.

Bassett, Thomas J. 2007. Nature as Local Heritage in Africa: Longstanding Concerns, New Challenges, *Africa: The Journal of the International African Institute*, 104-129.

Ittihadiyah, Himayatul. 2012. Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950): Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah "Negaragung" Kasultanan Mataram Islam (Vorstenlanden). *Thaqafiyyat Vol. 13*.

Niel, Robert Van. 1964. The Function of landrent under the Cultivation System in Java. *Journal of Asian Studies*, 23: 357-82.

Schendel, Willem Van. 2015. *What is Agrarian Labour? Contrasting Indigo Production in Colonial India and Indonesia.* Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

## Buku

Balfour-Paul, Jenny. 1999 *Indigo in South and South East Asia, Textile History.* New York: New York University.

Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870.* Amsterdam: Amsterdam University Press.

Burger, D. H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Carey, Peter. 1976. *The Origins of the Java War (1825-1830).* Jakarta: Gramedi.

Ghani, M. A. 2016. *Jejak lanters di Tanah Deli: Dinamika Perkebunan Sumatra Timur 1863-1996.* Bogor: IPB Press.

Graaf, H.J. de. 1989 *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram.* Jakarta: Grafiti Press.

Fasseur, C. 1991. *Tanam Paksa dan Laba Penjajahan: Eksploitasi Belanda atas Jawa, 1840-1860.* Netherland: Leiden Universitarie Pers.

Niel, Robert Van. 1992. *Java Under The Cultivation System.* Netherland: Collected Writings.

Niel, Robert Van. 1983. *Nineteenth-Century Java: Variations on the Theme of Rural Change.* KITLV.

Schendel, Willem Van. 2008. *The Asianization of Indigo: Rapid Change in a Global Trade Around 1800.* Netherland: Leiden Publisher.

## Skripsi

Winda Febriana Ardy. 2020. "Perkebunan Indigo dan Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Karesidenan Bagelen Tahun 1830-1864", *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.